

Hegemoni Agenda Global dan Tantangan Kemandirian Lokal: Analisis Sosiologi Pembangunan terhadap SDGs Desa

Sava Najwatun Kanaya¹, Hendi Irawan²

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: savanajwatunkanaya21@gmail.com

Diterima: 12-07-2026 | Disetujui: 18-07-2026 | Diterbitkan: 20-07-2026

ABSTRACT

The alignment of the global sustainable development agenda championed by the SDGs in reality clashes with the dynamics of local-level operationalization, which frequently perpetuates asymmetrical power relations between the state, the market, and rural communities. Employing a library research method with a qualitative-critical approach through the lens of the sociology of development, this study analyzes the implications of the "Village SDGs" (SDGs Desa) agenda in Indonesia on local self-reliance. The findings reveal that grassroots implementation of the SDGs has been reduced by the potent penetration of institutional neoliberalism, wherein village development is trapped in the formalities of administrative compliance and centralized digital control rather than fostering substantive community empowerment. Therefore, fundamental policy reformulation is crucial to transform the SDGs into a participatory, emancipatory, and socially just vehicle for rural communities.

Keywords: Village SDGs, Sociology of Development, Neoliberalism, Public Participation, Local Self-Reliance

ABSTRAK

Keselarasan agenda pembangunan berkesinambungan global yang diusung oleh SDGs pada kenyataannya berbenturan dengan dinamika operasionalisasi di tingkat lokal yang kerap melanggengkan asimetri relasi kuasa antara negara, pasar, dan komunitas perdesaan. Menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-kritis melalui perspektif sosiologi pembangunan, penelitian ini menganalisis bagaimana agenda SDGs Desa di Indonesia berimplikasi terhadap kemandirian lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa aplikasi SDGs di tingkat tapak mengalami reduksi akibat kuatnya penetrasi neoliberalisme institusional, di mana pembangunan desa terjebak pada formalitas kepatuhan administratif dan kontrol digitalisasi terpusat, alih-alih mendorong pemberdayaan warga secara substantif. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan secara fundamental sangat krusial dilakukan untuk mentransformasikan SDGs menjadi wahana pembangunan yang partisipatif, emansipatif, dan berkeadilan sosial bagi masyarakat desa.

Kata kunci: SDGs Desa, Sosiologi Pembangunan, Neoliberalisme, Partisipasi Publik, Kemandirian Lokal

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kanaya, S. N. ., & Irawan, H. . (2026). Hegemoni Agenda Global dan Tantangan Kemandirian Lokal: Analisis Sosiologi Pembangunan terhadap SDGs Desa. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 2864-2868. <https://doi.org/10.63822/aedams97>

PENDAHULUAN

Sejak disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda pembangunan global yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, serta degradasi lingkungan (UNDP, 2016). Dalam konteks pembangunan, SDGs berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan kebijakan negara anggota agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini menjadikan SDGs bukan sekadar dokumen internasional, melainkan kerangka regulatif yang memengaruhi arah kebijakan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kendati menawarkan kerangka kerja yang komprehensif, aplikasi SDGs di tingkat tapak sering kali berbenturan dengan realitas empiris masyarakat adat dan lokal. Kebijakan global yang bercorak top-down cenderung memprioritaskan standarisasi indikator administratif, sementara kebutuhan riil masyarakat perdesaan kerap kali terpinggirkan. Studi empiris dari Anggraini (2024) menunjukkan bahwa adopsi SDGs di desa-desa Indonesia lebih berorientasi pada pelaporan kuantitatif demi kepatuhan birokratis daripada pemberdayaan masyarakat secara substantif. Secara sosiologis, fenomena ini melahirkan persoalan berupa reproduksi asimetri relasi kuasa, di mana entitas negara dan penetrasi pasar mendominasi ruang hidup komunitas lokal, sekaligus mendepolitisasi partisipasi aktif warga desa. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, ketegangan ini merefleksikan kontradiksi antara agenda global yang hegemonik dengan tuntutan kemandirian lokal. Jika dijalankan tanpa adaptasi kontekstual, SDGs berisiko mengalami deviasi dari tujuan mulianya dan justru menjadi sarana baru bagi pelestarian ketimpangan struktural di perdesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Sosiologi Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses transformasi struktural yang multidimensional, bukan sekadar akumulasi pertumbuhan ekonomi linier sebagaimana didefinisikan dalam teori modernisasi Rostow (1960). Sebaliknya, teori ketergantungan (Frank, 1967) mengingatkan bahwa pembangunan sering kali menciptakan dependensi struktural wilayah periferi terhadap pusat kekuasaan. Sebagai antitesis atas pola pembangunan yang eksploitatif tersebut, pendekatan sosiologi pembangunan kritis menekankan pentingnya kedaulatan lokal, partisipasi emansipatif, serta keadilan sosial yang berpusat pada agensi manusia (Escobar, 1995).

b. SDGs sebagai Instrumen Global

Bernstein (2017) melalui konsep *governing through goals* menjelaskan bahwa SDGs berfungsi sebagai mekanisme tata kelola global. Agenda ini mendorong negara untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan standar internasional, meski menimbulkan pertanyaan tentang relevansi terhadap kebutuhan lokal.

c. Neoliberalisme dan Pembangunan Desa

Carroll (2007) menjabarkan bahwa neoliberalisme kontemporer bekerja secara halus melalui

institusi sosial (*Socio-Institutional Neoliberalism*). Dalam konteks pembangunan desa, watak neoliberal ini mengejawantah melalui birokratisasi ketat dan digitalisasi pelaporan yang memaksa aparat desa tunduk pada metrik performa administratif global. Akibatnya, ruang kedaulatan masyarakat desa untuk mendefinisikan arah kemandirian ekonominya secara mandiri menjadi terkooptasi oleh standardisasi pasar dan negara.

d. Studi Empiris Aplikasi SDGs

Penelitian Anggraini (2024) menunjukkan bahwa kajian operasionalisasi SDGs di desa Indonesia lebih berorientasi pada administrasi dan kepatuhan terhadap indikator global. Digitalisasi memperkuat dominasi negara atas desa, sementara partisipasi masyarakat masih minim. Temuan ini menegaskan risiko SDGs menjadi instrumen hegemonik yang mereproduksi ketimpangan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian kualitatif-kritis melalui studi kepustakaan (*library research*) ini menelaah literatur sekunder terkait SDGs, sosiologi pembangunan, dan tata kelola desa. Sintesis teoretis dibangun dengan mengonvergensi teori pembangunan (Rostow, 1960; Frank, 1967; Escobar, 1995), konsep *governing through goals* (Bernstein, 2017), serta perspektif *Socio-Institutional Neoliberalism* (Carroll, 2007). Kerangka tersebut dikomparasikan dengan temuan empiris Anggraini (2024) untuk membedah anomali operasionalisasi SDGs Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Orientasi Administratif

Operasionalisasi SDGs di tingkat desa menunjukkan deviasi akibat kuatnya beban administratif. Aparatur desa dipaksa mengalokasikan energi dan sumber daya mereka untuk memenuhi target-target pelaporan indikator global yang dirancang secara tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Pola ini menggeser fokus esensial pembangunan; orientasi desa tidak lagi diarahkan pada penyelesaian masalah riil di lapangan, melainkan pada kosmetik pelaporan performa demi kepatuhan birokratis.

Digitalisasi dan Birokratisasi Penjajahan Ruang Desa

Digitalisasi sistem pelaporan SDGs mempercepat proses birokratisasi di perdesaan. Penggunaan platform digital terpusat memaksa desa untuk mengikuti standar baku nasional secara kaku, yang secara tidak langsung merampas fleksibilitas inovasi lokal. Teknologi yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan justru beralih fungsi menjadi instrumen kontrol sosial dan politik negara untuk memperkuat hegemoni vertikal atas ruang-ruang otonom desa.

Polarisasi dan Kesenjangan Akses Teknologi

Teknokrasi digitalisasi SDGs memicu polarisasi sosiologis berupa kesenjangan teknologi antarwilayah. Desa-desa dengan kesiapan infrastruktur internet dan perangkat digital yang memadai dengan mudah dicap "berhasil" memenuhi indikator SDGs. Sebaliknya, wilayah perdesaan terpencil dengan keterbatasan akses teknologi semakin termarginalisasi dan dicap "tertinggal". Ketimpangan digital ini

mereproduksi stratifikasi sosial baru yang merugikan komunitas rentan.

Asimetri Relasi Kuasa dan Depolitisasi Warga

Konfigurasi kekuasaan dalam aplikasi SDGs memperlihatkan dominasi absolut aliansi negara dan pasar terhadap komunitas lokal. Desa diposisikan sekadar sebagai objek administratif penerima kebijakan, bukan subjek berdaulat yang memegang kendali atas ruang hidupnya. Mengacu pada tesis Carroll (2007), fenomena ini mengonfirmasi bagaimana jargon "pembangunan berkelanjutan" kerap kali ditunggangi oleh logika neoliberalisme institusional untuk menjinakkan potensi gerakan kritis dari akar rumput.

KESIMPULAN

Implementasi SDGs Desa merepresentasikan bekerjanya hegemoni teknokratis yang mensubordinasi otonomi dan kedaulatan komunitas lokal demi agenda global seragam. Melalui kacamata sosiologi pembangunan, standardisasi indikator SDGs yang bersifat *top-down* dan berbasis metrik kuantitatif-digital pusat berfungsi sebagai instrumen depolitisasi yang mereduksi hakikat pembangunan menjadi sekadar kepatuhan birokratis (*administrative compliance*). Fenomena ini melahirkan kontradiksi epistemis: alih-alih memberdayakan, SDGs Desa justru memperpanjang dependensi lokal, melanggengkan penetrasi neoliberalisme ke ruang perdesaan, dan mengalienasi kearifan sosial serta agensi lokal dari proses penentuan nasib mereka sendiri (*self-determination*).

SARAN

1. Dekonstruksi Kebijakan dan Pengakuan Epistemologi Lokal (Struktural): Mereorientasi kebijakan pembangunan perdesaan yang bias sentralistik-positivistik ke arah pengakuan legal-formal atas indikator kesejahteraan berbasis kearifan lokal (*indigenous indicators*), guna memberikan diskresi penuh bagi desa dalam menentukan parameter keberlanjutannya secara mandiri.
2. Repolitisasi Ruang Publik Desa melalui Demokrasi Deliberatif (Prosedural): Merevitalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai ruang diskursif yang emansipatif dengan mereduksi standardisasi digital eksternal yang kaku, sehingga fungsi Musrenbangdes sebagai wadah artikulasi kepentingan warga dapat dipulihkan secara autentik.
3. Redefinisi Peran Fasilitator dan Humanisasi Data (Praktis): Mentransformasikan peran pendamping desa dari agen pemantau administratif (*bureaucratic gatekeeper*) menjadi katalisator pemberdayaan sosiopolitik, serta mengintegrasikan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) pada basis data kementerian terkait agar mampu mengakomodasi data kualitatif dan narasi lokal guna menghindari simplifikasi sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. W. (2024). Sustainable Development Goals (SDGs) instrumentalization and neoliberal hegemony: A village perspective. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 11(2), 115-130.
- Bernstein, S. (2017). Governing through goals: Sustainable Development Goals as governance innovation.

MIT Press.

Carroll, T. (2007). The politics of the World Bank's socio-institutional neoliberalism. *Routledge*.

Escobar, A. (1995). Encountering development: The making and unmaking of the Third World. *Princeton University Press*.

Frank, A. G. (1967). Capitalism and underdevelopment in Latin America. *Monthly Review Press*.

Rostow, W. W. (1960). The stages of economic growth: A non-communist manifesto. *Cambridge University Press*.

UNDP. (2016). The Sustainable Development Goals Report . *United Nations Development Programme*.